

# DUKUNGAN RUSIA TERHADAP PEMERINTAH SURIAH DI TENGAH PARITAS KEKUATANNYA TERHADAP AMERIKA SERIKAT

Nadia Izzati

NIM 071311233072

Surabaya, Indonesia

## ABSTRAK

*Konflik Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 telah menciptakan dua aliansi yaitu Amerika Serikat dan Rusia yang saling bertolakbelakang dalam memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Amerika Serikat bersama aliansinya mendukung kelompok oposisi dalam mewujudkan proses transisi pemerintahan Suriah. Keberadaan aliansi Amerika Serikat kemudian mendorong Rusia untuk terlibat baik secara politik maupun militer pada konflik Suriah. Adanya keterlibatan Rusia tersebut sebagai bentuk upaya memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Dengan menggunakan teori Balance of Threat dan teori Power Transition membantu menjawab keterlibatan Rusia pada konflik Suriah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif agar dapat mengkaji lebih dalam konsep aliansi, strategi balancing, paritas kekuatan dan ketidakpuasan suatu negara terhadap sistem internasional yang ada di penelitian. Dalam penelitian ini kemudian ditemukan fakta-fakta yang menjelaskan bahwa Rusia ingin memperluas lingkaran pengaruh untuk menggeser dan menekan dominasi pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah akibat adanya paritas kekuatan dalam segi militer diantara Rusia dan Amerika Serikat. Dalam mewujudkan tujuannya, Rusia beraliansi dengan Suriah agar dapat menemukan celah untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah.*

**Kata Kunci:** *Rusia, Suriah, Aliansi, Balancing, Paritas Kekuatan*

*The Syrian conflict has taken place since 2011 created two alliances, namely the United States and Russia, which are in conflict with each other in giving to the parties to the conflict. The United States along with its allies supported the group in the Syrian government's execution process. The existence of US alliance to encourage Russia to engage both politically and militarily in the Syrian conflict. The existence of the joke it as a form of efforts*

*to expand its influence in the Middle East. Using the theory of Balance of Threat and Power Transition theories help answer Russia's flow to the Syrian conflict. This research uses explanative type of research in order to deepen the concept of alliance, balancing strategy, power parity and dissatisfaction in the countries that exist in the research. In this study later, found the facts that explain that Russia wants to expand with influence and in order to increase its domination over United States in the Middle East by the power parity in military between Russia and United States. In realizing, Russia alliance with Syria in order to find a gap for expansion in the Middle East.*

*Keywords: Russia, Syria, Alliance, Balancing, Power Parity*

Peristiwa *Jasmine Revolution* yang terjadi di Tunisia pada akhir tahun 2010 berdampak secara domino di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah (El-May, 2010; 58). Peristiwa tersebut merupakan sebuah aksi *pioneer* bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk melakukan revolusi pemerintahan. Suriah menjadi salah satu negara yang terkena dampak domino dari peristiwa *Jasmine Revolution* tersebut. Pada awal tahun 2011, Rakyat Suriah mulai melakukan aksi-aksi dalam merevolusi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad untuk turun dari posisi kepresidenan Suriah (Hof et al, 2013; 1). Dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap kinerja dinasti pemerintahan al-Assad dimana telah memimpin sejak awal kemerdekaan Suriah hingga pada era pemerintahan Bashar al-Assad. Kemudian salah satu tindakan Bashar al-Assad dengan memberlakukan undang-undang darurat (*emergency law*) yang melarang adanya pembatasan segala bentuk komunikasi bagi rakyatnya semakin mengundang rakyat untuk melakukan berbagai aksi revolusi.

Pada data bulan September 2015, tercatat sebanyak 200.000 orang menjadi korban jiwa akibat peperangan antara rakyat sipil dengan pemerintah Suriah (New York Times, 2015). Meningkatnya angka korban jiwa tersebut kemudian mendorong rakyat Suriah untuk membentuk kelompok oposisi yang lebih terstruktur yaitu Free Syrian Army (FSA) dalam menjatuhkan rezim Bashar al-Assad (Hof et al, 2013; 18). Serangan yang diluncurkan baik oleh pihak FSA maupun pemerintah seringkali terjadi di wilayah Homs, Hama, Aleppo, dan Idlib. Perang sipil tersebut diperparah dengan adanya aktivitas kelompok teroris seperti the Nusra Front dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berusaha untuk menguasai wilayah Suriah. ISIS sendiri telah menguasai beberapa wilayah di Suriah, terutama di wilayah Raqqa dan Palmyra (Anon, 2017). Pasukan militer Bashar al-Assad kemudian melakukan serangan yang ditujukan untuk ISIS dalam melindungi wilayah-wilayah Suriah terutama di wilayah Palmyra yang kaya akan pertambangan minyak dan merupakan kawasan bersejarah Suriah (Huffington Post, 2015).

Konflik peperangan yang melibatkan pemerintah Suriah, kelompok oposisi, dan ISIS mengundang perhatian global. Tindakan pemerintah Bashar al-Assad dalam menggunakan militerisasi terhadap rakyatnya menuai banyak kecaman dari aktor-aktor internasional. Konflik Suriah tersebut kemudian menciptakan dua koalisi yaitu koalisi Amerika Serikat dan Rusia. Bersama Australia, Denmark, Belanda, Perancis, Jerman, Yordania, dan Inggris, koalisi Amerika Serikat dengan tegas mengecam kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Bashar al-Assad dan memberi dukungan terhadap kelompok oposisi dengan tujuan mewujudkan transisi politik dan menjatuhkan rezim Bashar al-Assad. Berbagai macam bentuk dukungan diberikan oleh koalisi Amerika Serikat. Keberadaan koalisi Amerika Serikat dalam konflik Suriah kemudian menciptakan koalisi oposisi. Rusia bersama Iran, Iraq, dan Lebanon-Hezbollah kemudian bergabung untuk menciptakan sebuah koalisi untuk memberikan dukungan dalam mempertahankan rezim Bashar al-Assad dan menekan upaya resolusi konflik yang mengancam keberlangsungan rezim Bashar al-Assad.

Keberadaan Amerika Serikat bersama koalisinya untuk menggeser rezim Bashar al-Assad mendorong Rusia bersama koalisinya untuk melakukan aksi penolakan terhadap upaya-upaya Amerika Serikat dalam meresolusi konflik baik secara militer maupun secara politik. Secara diplomatik, Rusia bersama Tiongkok melakukan salah satu pemberian veto terhadap rancangan resolusi DK PBB terhadap pemerintah Suriah pada tahun 2011 (Security Council United Nations, 2011). Secara militer, terhitung sejak 30 September 2015, Rusia mulai meluncurkan serangan dengan serangan udara di beberapa wilayah Suriah dengan tujuan untuk melawan kelompok oposisi Presiden Bashar al-Assad dan memberantas kelompok teroris ISIS di Suriah (McDonnell, 2015).

### Bertahannya Aliansi dalam Bentuk Dukungan-Dukungan Rusia terhadap Pemerintah Bashar Al-Assad

Dengan sejarah hubungan diplomatik yang panjang dan erat, Rusia secara aktif memberikan dukungannya terhadap dinasti rezim pemerintahan al-Assad yang telah memimpin sejak tahun 1970. Dukungan Rusia terhadap rezim al-Assad semakin intens ketika mulai pecahnya konflik sipil Suriah pada 2010. Dukungan Rusia yang tertuju pada pemerintah dalam melawan rakyat sipil tertuang dalam pernyataan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev pada pertemuan dengan Presiden Bashar al-Assad tanggal 11 Mei 2010. Medvedev (President of Russia, 2010) menyatakan bahwa secara eksplisit menekankan untuk mempererat hubungan bilateral keduanya terutama di bidang ekonomi dan kemanusiaan terkait dengan konflik yang tengah terjadi di Suriah. Dengan meningkatnya konflik sipil Suriah pada Maret 2011, Rusia semakin

gencar untuk memberikan kontribusi dalam mediasi antara pemerintah Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi pemerintah Suriah (Zvyagelskaya, 2016: 85).

Berdasarkan the Syrian Observatory for Human Rights tercatat di tahun 2015 sebanyak hampir 206.603 jiwa menjadi korban dan ribuan rakyat Suriah terpisah dan memutuskan untuk mengungsi ke beberapa negara (Gladstone dan Ghannam, 2015). Tingginya angka korban jiwa dan pengungsi Suriah akibat konflik tersebut kemudian mengundang perhatian global khususnya kelompok negara-negara Barat seperti US dan negara Eropa serta PBB untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Rencana sanksi yang akan ditujukan kepada pemerintahan al-Assad dan sembilan belas warga negara Syria tersebut kemudian dilihat oleh Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, sebagai tindakan yang tidak perlu dilakukan (Charbonneau, 2011).

Bersama dengan Tiongkok, Rusia memutuskan untuk melakukan veto terhadap rancangan resolusi sanksi tersebut. Kedua negara tersebut menilai bahwa sanksi tersebut merupakan suatu tindakan yang *counterproductive* sehingga DK PBB sepatutnya untuk mengedepankan sebuah dialog diantara pihak-pihak yang terlibat dan menekankan asas-asas non-intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara untuk menghargai kedaulatan serta integritas teritori suatu negara (Security Council United Nations, 2011). Konflik pun masih bergulir hingga memasuki tahun 2012. Rusia masih memberikan hak vetonya ketika DK PBB kembali mengeluarkan sebuah rancangan resolusi untuk pemerintah Suriah pada tanggal 4 Februari 2012 (Security Council United Nations, 2012). Dalam rancangan resolusi yang diprakarsai oleh tersebut mendesak segala pihak yang terlibat dalam konflik Suriah, baik pemerintah Suriah maupun kelompok oposisi untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan pembalasan. Lebih detail, dalam rencana resolusi tersebut Suriah didesak untuk segera melindungi populasinya dengan menarik seluruh pasukan keamanannya di wilayah kota dan mengadakan demonstrasi yang damai (Security Council United Nations, 2012). Berbeda dengan Rusia, melalui vetonya terhadap rancangan resolusi tersebut, Rusia yang diwakili oleh Vitaly Churkin menilai bahwa hal tersebut tidaklah seimbang dan kurang akurat dalam penyelesaian konflik Suriah. Rancangan resolusi dianggap Rusia tidak berfokus untuk mendesak para kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan kelompok ekstrimis untuk mengakhiri kekerasan yang turut memperkuat tensi konflik di Suriah (Security Council United Nations, 2012).

Pada tanggal 19 Juli 2012, untuk kedua kalinya di tahun 2012, Rusia menjatuhkan vetonya kembali pada resolusi yang bertujuan untuk memperpanjang mandat Misi Pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Suriah (UNSMIS) dan memberikan ancaman sanksi terhadap Suriah untuk segera menghentikan penggunaan militerisasi terhadap rakyat sipilnya (Security

Council United Nations, 2012). Misi pengawasan tersebut didasari oleh bab VII Piagam PBB mengenai penuntutan kepatuhan sebuah negara. DK PBB membentuk UNSMIS – untuk misi selama tiga bulan dan dengan sebanyak 300 pasukan keamanan yang tidak bersenjata - pada bulan April 2012 untuk memantau penghentian terencana kekerasan di Suriah, serta untuk memantau dan mendukung implementasi penuh dari rencana perdamaian (Security Council United Nations, 2012). Churkin (Security Council United Nations, 2012) menyatakan bahwa resolusi tersebut merupakan hal yang dapat mendorong adanya intervensi militer yang lebih luas. Perwakilan Suriah dalam rapat DK PBB tersebut menambahkan bahwa sebuah resolusi praktis yang sederhana seharusnya diadopsi untuk memperluas mandat UNSMIS dan membantu pelaksanaan rencana perdamaian, namun pada resolusi tersebut hanya lebih menginginkan adanya intervensi eksternal.

Di tahun 2013, konflik sipil Suriah semakin mengalami eskalasi. Pada tanggal 21 Agustus 2013, pemerintah Suriah diduga melakukan sebuah serangan yang menyerang kelompok oposisi dan rakyat sipil dengan menggunakan gas kimia sarin di wilayah Ghouta, Suriah (Shoham, 2017: 2). Dengan dugaan serangan gas sarin yang ditujukan kepada pemerintah Suriah, Rusia kemudian mengambil langkah persuasif untuk melakukan sebuah diskusi dengan Presiden Bashar al-Assad. Diskusi tersebut bertujuan mempersuasi Presiden Bashar al-Assad agar segera menyerahkan senjata kimia yang dimiliki dan bersedia untuk bergabung dengan CWC. Tidak hanya itu, ajakan Rusia kepada Presiden Bashar al-Assad juga ditujukan untuk menghindari adanya serangan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri telah menyatakan pada tahun 2012 bahwa Amerika Serikat akan melakukan serangan ketika Pemerintah Suriah melakukan serangan dengan menggunakan senjata kimia (Blanchard dan Sharp, 2013).

Tahun 2014 menjadi tahun dimana mediasi Jenewa (Geneva Talks II) yang kedua diadakan sebanyak dua kali. Mediasi putaran pertama diadakan di bulan Januari pada tanggal 24 hingga 31 Januari dan mediasi putaran kedua diadakan di bulan Februari pada tanggal 10 hingga 15 Februari (Arab Center for Research and Policy Studies, 2014: 1). Pada mediasi ini, Rusia berhasil untuk mengajak Suriah untuk berpartisipasi dalam mediasi yang diadakan di Jenewa tersebut (Anon, 2014a). Mediasi pertama pun gagal sehingga mediasi kedua terjadi satu bulan berikutnya. Namun perundingan putaran kedua berjalan tanpa mencapai hasil yang nyata. Pada bulan Juni 2014, Presiden Bashar al-Assad mengadakan sebuah pemilihan umum dengan dua kandidat yang berasal dari luar keluarga al-Assad yang didukung penuh oleh Rusia (Anon, 2014b). Hal tersebut dikemukakan oleh juru bicara Menteri Luar Negeri, **Alexander Lukashevich yang menyatakan “Moscow sees the vote as an important event that safeguards the continued functioning of state institutions in Syria” (Spencer, 2014).**

Dalam beberapa kali kesempatan, Rusia secara implisit menyatakan ketidaksetujuan dan kritik terhadap beberapa keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian konflik di Suriah. Salah satu bentuk ketidaksetujuan Rusia disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin pada pertemuan Majelis Umum PBB pada 28 September 2015 yang menyatakan bagaimana negara Barat khususnya Amerika yang terus mendesak adanya demokrasi yang merata di tiap-tiap negara di kawasan Timur Tengah (President of Russia, 2015a). Bagi Presiden Vladimir Putin, desakan demokrasi di negara Timur Tengah hanya dapat meningkatkan kekerasan, kemiskinan, dan munculnya berbagai kelompok ekstrimis. Bersama pernyataan tersebut, Presiden Vladimir Putin mengajak seluruh anggota PBB untuk bergabung dalam aksi militernya dalam konflik Suriah untuk menekan keberadaan kelompok teroris di Suriah. Ketidaksetujuan Rusia juga disampaikan dalam sebuah pertanyaan yang dilontarkan salah satu audiens dalam Forum Investasi Russia Calling! Pada 13 Oktober 2015 bahwa dinyatakan oleh Presiden Barrack Obama bahwa Rusia dengan sengaja membangun aliansi bersama dan memberikan dukungan kepada Presiden Bashar al-Assad. Melalui Presiden Vladimir Putin, Rusia memberikan bantahan terhadap dugaan Amerika Serikat tersebut yang dinyatakan bahwa Rusia dalam keterlibatannya di Suriah tidak mencari sebuah kepemimpinan. Presiden Vladimir menyatakan bahwa Rusia hanya berkontribusi dalam melawan terorisme yang terjadi di Suriah melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan piagam PBB dan hukum internasional (President of Russia, 2015b). Lebih lanjut, Presiden Vladimir Putin juga menyatakan bahwa koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat tidak sesuai dengan aturan yang ada dimana mereka bertindak tidak didasari atas bersedianya pemerintah Suriah.

Bertempat di Vienna, pada tanggal 14 November 2015, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh PBB, Liga Arab, dan negara anggota ISSG digelar (United Nations, 2015a). Pertemuan tersebut membahas rencana untuk mengakselerasi penyelesaian konflik di Suriah dengan diimplementasikannya gencatan senjata dan proses politik yang sesuai dengan Geneva Talks I yang digelar pada 2012. Dalam pernyataan bersama Amerika Serikat dan Rusia sebagai ketua bersama dari ISSG, dijelaskan bahwa gencatan senjata akan diberlakukan pada tanggal 27 Februari 2016 (Ministry of Foreign Affairs of the Russia Federation, 2016a). Gencatan senjata tidak berlaku kepada kelompok teroris baik Daesh, Jabhat The Nusra Front/The Nusra Front, dan lainnya sesuai dengan arahan DK PBB. Pada akhir Desember 2016, Rusia bersama Iran dan Turki melakukan sebuah pertemuan yang menghasilkan *Moscow Declaration* yang membahas mengenai gencatan senjata yang perlu untuk diimplementasikan kembali. Deklarasi tersebut berkaca pada kesepakatan gencatan senjata yang disepakati baik oleh pemerintah Suriah dan kelompok oposisi pada awal 2016 yang kemudian gugur akibat kurang patuhnya kelompok oposisi dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Diselenggarakan di Moscow, pertemuan Menteri Luar Negeri Rusia, Iran, dan Turki pada tanggal 20 Desember

2016 membahas dan mengeksplorasi masa depan politik Suriah (Arab Center for Research and Policy Studies, 2014).

Terhitung sejak 30 September 2015, serangan militer mulai diluncurkan Rusia untuk pertama kalinya (Humud et al., 2015). Dalam serangan militer perdana tersebut melibatkan sedikitnya 20 pesawat tempur untuk melancarkan serangan udara di wilayah Homs dan Hama dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang banyak ditempati oleh kelompok oposisi (Institute for the Study of War Research Team, 2016). Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa serangan tersebut ditujukan untuk penyerangan terhadap kelompok teroris ISIS dan the Nusra Front yang berafiliasi dengan kelompok teroris al-Qaeda (Ministry of Defence of the Russia Federation, 2015). Dalam pertemuan tanggal 7 Oktober 2015 antara Presiden Vladimir Putin dengan Menteri Pertahanan Sergey Lavrov, Lavrov melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan intensitas serangan yang mengakibatkan sebanyak 112 target berhasil dilumpuhkan sejak serangan pertama pada 30 September 2015, yang meliputi pos komando, depot amunisi, perangkat keras militer, dan kamp pelatihan kelompok teroris ISIS (President of Russia, 2015).

Rusia memiliki persediaan aktif sebanyak 2.000 non-strategis nuklir senjata yang meliputi rudal udara-ke-permukaan, rudal balistik jarak pendek, bom gravitasi, dan muatan mendalam untuk pembom jarak menengah, pembom taktis, penerbangan angkatan laut, serta rudal anti-kapal, anti-kapal selam, anti-pesawat terbang dan torpedo baik untuk kapal permukaan maupun kapal selam (Defense Intelligence Agency, 2016). Dengan amunisi dan pasukan yang luar biasa tersebut tidak heran apabila serangan militer yang dilayangkan Rusia merupakan sebuah undangan dari Presiden Bashar al-Assad dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Bashar al-Assad yang dinyatakan dalam pertemuan Presiden Vladimir Putin dan Presiden Bashar al-Assad pada tanggal 21 Oktober 2015. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia menerima permintaan pemerintah Suriah dalam membantu memberantas terorisme yang telah menduduki beberapa wilayah Suriah (President of Russia, 2015c). Presiden Vladimir Putin juga menyatakan bahwa Rusia telah mengambil posisi untuk mendukung segala bentuk upaya penyelesaian konflik melalui operasi militer yang berdasarkan pada proses politik yang ada.

Sepanjang bulan Desember 2015, Rusia telah memperluas operasinya di Suriah. Hal tersebut dapat dilihat dengan dibangunnya pangkalan udara oleh Rusia di wilayah kota Homs, pengiriman sejumlah peralatan militer baru guna menunjang peningkatan operasi militernya di Suriah (Parfitt dan Trew, 2015). Dalam pernyataan Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Letnan Jenderal Sergey Rudskoy, tercatat dari awal penyerangan pada akhir September hingga bulan Desember 2015, Rusia

telah meluncurkan 5.240 sorti serangan di Suriah dimana sebanyak 145 sorti merupakan serangan udara dengan 600 target penyerangan yang berbeda (Ministry of Defence of the Russia Federation, 2015). Sejak adanya kesepakatan untuk gencatan senjata pada akhir Februari, ketegangan akibat konflik sedikit mereda. Dalam pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin pada 14 Maret 2016, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu secara bergantian melaporkan bahwa operasi militer yang dilakukan sejak 30 September 2015 telah berhasil untuk meredam aksi terorisme di Suriah dengan hancurnya tempat-tempat yang dijadikan gudang amunisi para kelompok teroris (President of Russia, 2016).

Presiden Vladimir Putin kemudian memerintahkan Menteri Pertahanan Sergey Lavrov menarik bagian utama kelompok militer Rusia dari Republik Arab Suriah yang dimulai 15 Februari 2016 serta meminta Kementerian Luar Negeri Rusia untuk mengintensifkan keikutsertaan Rusia dalam mengatur proses perdamaian untuk menyelesaikan masalah Suriah. Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa kedua pangkalan militer Rusia di Suriah (pangkalan angkatan laut di Tartus dan pangkalan udara di Hmeymim) akan terus beroperasi dalam pemantauan gencatan senjata (President of Russia, 2016). Serangan intensif kembali terjadi di wilayah Aleppo dimana Rusia berkontribusi secara aktif dalam membantu pasukan keamanan pemerintah terutama pada perebutan wilayah Aleppo yang terjadi pada November hingga Desember 2016. Pertempuran Aleppo pada bulan November tersebut terjadi pada 15 November 2016 diawali dengan serangan Rusia di wilayah Timur Aleppo (Graham-Harrison, 2016). Pendudukan sebagian besar wilayah Aleppo tersebut memberikan sebuah kemenangan tersendiri bagi pemerintah Suriah. Pada tanggal 9 Desember 2016, pasukan keamanan pemerintah Suriah berhasil untuk mengambil alih 93% wilayah Aleppo (Anon, 2016). Lebih dari 10.500 orang, termasuk lebih dari 4.000 anak-anak, telah dievakuasi dari wilayah Aleppo yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok oposisi dan sebanyak 1000 rakyat yang tergabung dalam kelompok oposisi telah setuju untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada pasukan keamanan pemerintah kemudian meninggalkan wilayah Aleppo (TASS, 2016).

### Motif Dukungan Rusia: Ketidakpuasan, Paritas Kekuatan, dan Strategi *Balancing* terhadap *Status Quo* Amerika Serikat

Rusia hadir sebagai salah satu negara yang memegang pengaruh besar dalam dinamika konflik Suriah, baik secara politik maupun militernya. Dengan memegang pengaruh yang besar dalam konflik Suriah kemudian menunjukkan bagaimana Rusia telah bangkit paska hancurnya Uni Soviet di awal tahun 1990. Berdirinya Rusia sebagai sebuah negara federasi membuat Rusia berusaha untuk beradaptasi dengan mengembangkan kualitas kekuatan



internal negaranya. Dibawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia perlahan berhasil untuk memulihkan perekonomiannya dengan beberapa kebijakan ekonomi yang baru. Tercatat dalam periode tahun 2000 hingga tahun 2007, meskipun mengalami fluktuasi, GDP Rusia hampir tidak berada dibawah 5% (Sakwa, 2008: 299). Rusia merupakan negara yang menggantungkan energi sebagai salah satu sumber profit yang besar sehingga menjadikan Rusia sebagai salah satu eksportir minyak dan gas terbesar sebagai supplier kebutuhan energi negara-negara (Mankoff, 2009: 5).

Tahun 2008 hingga 2014, Rusia menghadapi krisis sehingga pertumbuhan perekonomian Rusia kian melambat. Akan tetapi pada enam bulan awal tahun 2016, permintaan investasi mengalami peningkatan sehingga meningkatkan satu persen pertumbuhan GDP Rusia (World Bank Report, 2016: 14). Berdasarkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia, jumlah usaha baru baik besar kecil dan menengah mengalami peningkatan secara signifikan. Meskipun masih mengalami stagnansi dalam pertumbuhan perekonomian namun Rusia sendiri masih berupaya dalam meningkatkan perekonomiannya secara perlahan. Pada akhir tahun 2016, tercatat GDP Rusia menyentuh 2.7% dan diharapkan dapat mengalami kenaikan pada tahun 2017 (World Bank Report, 2016: 14).

Berdasarkan ranking GDP, Rusia sendiri berada di posisi 12 dengan total GDP sebanyak 1.283.162 juta dolar Amerika (Databank World Bank, 2017: 1). Amerika Serikat sebagai negara dominan memimpin dengan berada di posisi pertama dengan total 18.569.100 juta dolar Amerika. Dengan memegang posisi pertama berdasarkan total GDP, tidak kemudian menyelamatkan Amerika Serikat terhindar dari stagnansi perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2016. Amerika Serikat harus menerima bahwa laju pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat tahun 2016 hanya mencapai 1.6% (Gillespie, 2017).

Perbedaan yang cukup signifikan diantara Rusia dengan Amerika Serikat dapat dilihat dari pembagian perekonomian regional negara masing-masing. Rusia sendiri membagi regional perekonomiannya menjadi sembilan distrik dimana pusat perekonomian Rusia berada di Distrik Federal Pusat. Distrik Federal Pusat sendiri memegang 35% perekonomian Rusia yang menyebabkan terpusatnya konsentrasi ekonomi di suatu wilayah (Shapiro, 2016: 2). Layaknya Rusia, Amerika Serikat sendiri memiliki sembilan distrik perekonomian namun dengan jumlah prosentase pembagian perekonomian yang tidak jauh berbeda diantara distrik tersebut. Hal tersebut menjadikan pembagian aktivitas ekonomi yang lebih tersebar. Perbedaan sistem persebaran aktivitas ekonomi antara Rusia dan Amerika Serikat tersebut menunjukkan bagaimana adanya kecenderungan terpusatnya konsentrasi perekonomian dalam suatu wilayah menyebabkan Rusia lebih rentan untuk mengalami ketidakstabilan ekonomi (Shapiro, 2016: 4).

Dewasa ini, Rusia kembali sebagai negara challenger. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Douglas Lemke (1997: 24), negara challenger merupakan negara yang memiliki perkembangan pertumbuhan internal yang baik maka akan mampu untuk bergerak dalam menyaingi dominasi negara dominan dalam tatanan internasional. Ketika negara challenger telah memiliki cukup kekuatan secara internal dalam upaya menyaingi dominasi negara dominan, maka paritas kekuatan akan tercapai. Untuk dapat menyeimbangkan kekuatan internalnya, Rusia terus menerus mengembangkan kekuatan dalam sektor militer. Dalam cakupan militer, Rusia telah terbukti dengan kapabilitas militer dan pertahanannya yang dinilai kuat yang mampu memproyeksikan kekuasaan dan menambahkan kredibilitas pada diplomasi Rusia. Adanya histori mengenai kapabilitas militer yang kuat juga mendasari pengembangan militer Rusia dengan terus memodernisasi kekuatan militernya termasuk nuklir dan sistem persenjataan konvensional (Defense Intelligence Agency, 2016). Negara challenger akan cenderung untuk memperkuat kekuatan militernya untuk mencapai paritas kekuatan terhadap negara dominan. Rusia tidak hanya memperbarui sistem persenjataannya namun juga memperbarui kapabilitasnya dalam operasi bersama dengan negara lain, koordinasi antar agensi dan strategi mobilitasnya. Pembaharuan terhadap modernisasi sistem militernya terbentuk dari ambisi, persepsi ancaman dan visi peperangan baik secara politik maupun militer (Klein, 2016: 4).

Pasukan aktif bersenjata Rusia memiliki total 1.490.000 personel dimana tiap tahunnya, Presiden Vladimir Putin memutuskan untuk menambah jumlah pasukan bersenjata (Data World Bank, t.t). Rusia saat ini memiliki persediaan aktif sekitar 2.000 non-strategis nuklir senjata yang meliputi rudal udara-ke-permukaan, rudal balistik jarak pendek, bom gravitasi, dan muatan mendalam untuk pembom jarak menengah, pembom taktis, dan penerbangan angkatan laut, serta rudal anti-kapal, anti-kapal selam, dan anti-pesawat terbang dan torpedo untuk kapal permukaan dan kapal selam. Dalam perkembangan militernya, Rusia menyediakan budget untuk pengeluaran militernya sebanyak 69.2 miliar dolar Amerika Serikat dimana memakan sebanyak 5.3% dari total GDP Rusia (Tian et al., 2017: 2). Rusia sendiri juga memiliki kekuatan nuklir yang dapat membantu Rusia dalam mencegah ancaman dan melengkapi kekuatan persenjataan konvensional. Kristensen dan Norris (2016: 125) menyatakan bahwa kepemilikan nuklir oleh Rusia mencerminkan bahwa nuklir adalah salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk keamanan dan pencapaian status Rusia sebagai kekuatan besar. Total kekuatan senjata nuklir Rusia mencapai 7.290 hulu ledak (Kile dan Kristensen, 2016).

Secara militer, Amerika Serikat sendiri berada dalam *ranking* pertama secara global. Kepentingan nasional yang dijunjung tinggi oleh kekuatan militer Amerika Serikat adalah untuk melindungi Amerika Serikat, melindungi warganegara Amerika Serikat baik di dalam

dan luar negeri, serta menjamin keamanan sekutu Amerika Serikat, ekonomi global dan tatanan internasional dari ancaman-ancaman global baik itu dari dua kekuatan besar yang sedang berkembang yaitu Tiongkok dan Rusia, kelompok ekstrimis, lingkungan, dan **perkembangan pesat teknologi (Petraus dan O'Hanlon, 2016)**. U.S Army atau angkatan darat Amerika Serikat merupakan komponen utama militer Amerika Serikat namun angkatan darat Amerika Serikat sendiri secara kapasitas, kapabilitas dan kesiapannya mengalami penurunan. Tidak seburuk angkatan darat, namun angkatan laut, angkatan udara, korps laut, dan kapabilitas nuklir juga turut mengalami penurunan. Total dari pasukan aktif bersenjata Amerika Serikat berjumlah 1.347.300 personel (Data World Bank, t.t). Jumlah tersebut sesuai dengan adanya pemangkasan terhadap budget pengeluaran militer Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri mengeluarkan sebanyak 611 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2016 untuk keperluan militernya dimana jumlah tersebut merupakan 3.3% dari total GDP (Tian et al., 2015:2). Untuk tetap meningkatkan kekuatan militernya, Amerika Serikat tercatat sebagai salah satu negara dengan kepemilikan senjata nuklir. Amerika Serikat sendiri memiliki total 7.000 hulu ledak nuklir (Kile dan Kristensen, 2016).

Dengan kapabilitas militer dan pengembangan politik internal mampu membangkitkan Rusia di panggung dunia. Secara politik, Rusia telah mengembangkan kekuatan politik internal negaranya dengan melakukan kerjasama baik bilateral dan multilateral ataupun bergabung dengan organisasi-organisasi dunia lainnya. Salah satunya adalah bergabung dengan PBB dan menjadi anggota dari DK PBB. Dengan menjadi anggota DK PBB, akan memberikan kekuatan dan pengaruh bagi Rusia di ranah global sehingga sedikit banyak membantu Rusia untuk menguatkan politik internalnya. Kebangkitan kekuatan Rusia kemudian dapat dilihat ketika Rusia terlibat secara militer dan politik dalam aneksasi di Semenanjung Crimea, melakukan destabilisasi di Ukraina, terlibat konflik Suriah atas undangan dari Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Sebagai negara challenger, baik secara eksplisit maupun implisit Rusia menentang preferensi-preferensi Amerika Serikat yang notabene menjadi negara dominan dalam tatanan internasional. Penentangan tersebut cenderung dilakukan oleh negara challenger menunjukkan bentuk ketidakpuasan terhadap tatanan internasional yang dibentuk oleh negara dominan (Kugler dan Organski, 1989). Ketidakpuasan Rusia terhadap preferensi-preferensi Amerika Serikat dalam tatanan internasional telah terjadi sejak akhir tahun 2000, waktu dimana Presiden Vladimir Putin mulai untuk mengembangkan kembali kekuatan militer Rusia dan mulai untuk menguatkan kembali hubungan diplomatik Rusia dan Suriah yang telah terjalin sejak era Perang Dingin (Rahman-Jones, 2017). Hubungan diplomatik yang terjalin kembali tersebut semakin dekat dengan keterlibatan Rusia dan memberikan

dukungannya terhadap pemerintah Suriah ketika konflik Suriah mulai terjadi pada awal tahun 2011.

Dukungan yang kemudian diberikan Rusia untuk mempertahankan Presiden Bashar al-Assad kemudian menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kekuatannya baik secara politik ataupun militer bahwa Rusia hadir sebagai negara challenger untuk mempertahankan pengaruhnya dan ketidakpuasan Amerika Serikat yang pada sejarahnya memiliki keinginan untuk menyebarkan ideologi demokrasi di kawasan Timur Tengah. Dukungan tersebut juga menunjukkan secara global bagaimana kapabilitas militer Rusia dan berbagai persenjataan yang telah dimodernisasi (Rahman-Jones, 2017). Adanya peningkatan pengaruh Rusia dalam skala global dapat memberikan Rusia kesempatan untuk menekan ketidakpuasan Rusia terhadap tatanan internasional Amerika Serikat, khususnya dalam konflik Suriah.

Dalam konflik Suriah sendiri, Rusia telah mengambil tindakan-tindakan yang mencerminkan ketidakpuasan Rusia terhadap tatanan internasional terkait bagaimana negara dominan memimpin untuk melakukan penyelesaian konflik. Salah satu tindakan Rusia diantaranya adalah dengan memberikan veto terhadap rancangan resolusi DK PBB terkait penyelesaian konflik Suriah. Penjatuhan veto tersebut terjadi satu kali pada tahun 2011 dan dua kali pada tahun 2012. Rusia memiliki preferensinya sendiri dengan mengadakan dialog diantara pihak yang terlibat akan menjadi langkah efektif dibandingkan menyerukan desakan-desakan terhadap pihak yang terlibat. Secara implisit, dalam pertemuan Majelis Umum Majelis Umum PBB pada 28 September 2015, Rusia menyuarakan ketidaksetujuannya yang secara anonim ditujukan untuk salah satu negara kelompok Barat (President of Russia, 2015). Melalui Presiden Vladimir Putin, Rusia merujuk pada Amerika Serikat yang merupakan satu-satunya negara dominan yang selalu mendorong dan memberikan desakan dalam konflik Suriah untuk segera diberlakukannya sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut Presiden Vladimir Putin, dengan mendesak adanya sistem demokrasi di Suriah tidak akan mendorong terjadinya kesejahteraan yang absolut. Penilaian Presiden Vladimir Putin tersebut berdasar pada sistem demokrasi yang telah diimplementasikan di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara yang mengalami kenaikan angka kemiskinan, kekerasan dan kelompok ekstrimis yang cukup tinggi.

Secara eksplisit dinyatakan oleh Presiden Vladimir Putin dalam Forum Investasi Russia Calling!. Dalam forum investasi tersebut, Presiden Vladimir Putin menjelaskan pencarian kepemimpinan yang dituduhkan oleh Amerika Serikat merupakan sebuah tuduhan tanpa bukti yang jelas. Keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah merupakan sebuah undangan dari Presiden Bashar al-Assad untuk membantu dalam menekan angka serangan teroris agar konflik Suriah mengalami deeskalasi. Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa

keterlibatan Amerika Serikat beserta aliansinya yang tidak sesuai dengan aturan dikarenakan tidak adanya undangan yang diberikan pemerintah Suriah guna menyelesaikan konflik tersebut.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengukur ketidakpuasan suatu negara terhadap tatanan internasional yang ada. Ketidakpuasan Rusia yang ditunjukkan terhadap tatanan internasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat dalam konflik Suriah, dapat diukur melalui dua cara. Cara pertama yang dapat digunakan adalah dengan melihat preferensi pembentukan aliansi yang dimiliki masing-masing negara (Kim, 1985 dalam Lemke, 1997: 25). Dalam konflik Suriah, Rusia membangun aliansi bersama Suriah, Iran, dan Lebanon-Hezbollah. Rusia bersama tiga negara lainnya yang tergabung dalam aliansi tersebut merupakan negara-negara yang kurang memiliki kepuasan terhadap tatanan internasional Amerika Serikat. Cara yang kedua yang dapat menunjukkan ketidakpuasan Rusia terhadap Amerika Serikat sebagai negara dominan adalah dengan melihat perkembangan militer yang dimiliki oleh Rusia, sebagai negara challenger (Werner dan Kugler, 1985 dalam Lemke, 1997: 25). Rusia dapat dinilai telah mencapai paritas kekuatan dengan pertumbuhan dan perkembangan internal negaranya yang cukup baik. Dalam bidang militer, secara historis Rusia memiliki warisan kekuatan militer yang sangat kuat.

Berdasarkan pada asumsi dasar milik Carr (1995) yang menjelaskan bahwa negara berkembang yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang cukup baik maka akan mampu untuk bersaing dalam menyebarkan pengaruh dengan negara dominan. Pada umumnya, strategi balancing diterapkan oleh negara yang memiliki gap perbedaan kekuatan yang cukup kecil dan tidak terlalu jauh apabila dibandingkan dengan negara dominan sehingga dapat mampu menyaingi kapabilitas dan pengaruh negara dominan. Dapat dikatakan strategi balancing seringkali diaplikasikan oleh negara yang telah atau mampu untuk mencapai paritas kekuatan dengan negara dominan. Dalam konflik Suriah, strategi balancing jelas sekali terlihat digunakan oleh Rusia untuk terlibat aktif baik secara politik ataupun militer sejak tahun 2011 hingga 2016. Melalui strategi balancing, Rusia membangun aliansi bersama Suriah, Iran, dan Lebanon-Hezbollah dalam menyeimbangi aliansi Amerika Serikat. Membangun aliansi dengan ketiga negara tersebut kemudian tidak hanya ditujukan untuk menyeimbangi kekuatan aliansi Amerika Serikat di konflik Suriah namun juga untuk memperluas pengaruh keterlibatan Rusia dalam konflik tersebut.

Dalam penjelasan milik Walt (1985: 4), dijelaskan bahwa sebuah negara yang menerapkan strategi balancing cenderung memiliki urgensi-urgensi yang ingin dicapai. Umumnya terdapat dua urgensi. Pertama adalah untuk memperluas pengaruhnya di tatanan internasional. Dalam mencapai urgensi tersebut, membangun aliansi bersama negara-negara

lemah menjadi langkah awal untuk meraih pengaruh di tatanan internasional. Dengan memiliki kapabilitas yang lebih dibandingkan negara-negara lemah, maka negara yang menerapkan strategi *balancing* akan menjadi dominasi baru dalam aliansi tersebut. Dapat dilihat dalam konflik Suriah, dengan membangun aliansi bersama Suriah, Iran, dan Lebanon-Hezbollah adalah sebuah langkah awal bagi Rusia agar dapat memperluas pengaruhnya dalam tatanan internasional. Bergabungnya Rusia ke dalam aliansi Suriah, Iran, dan Lebanon-Hezbollah telah berhasil memperluas pengaruhnya kawasan Timur Tengah sebagai negara dominan dalam aliansi yang notabene berisikan negara-negara di kawasan Timur Tengah tersebut.

Tak hanya itu, Walt (1985: 4) juga menjelaskan bahwa sebuah negara dalam meningkatkan pengaruhnya dalam aliansi tersebut akan jauh lebih mudah dikarenakan negara-negara yang lebih lemah akan cenderung mencari perlindungan dan bantuan terhadap negara yang paling dominan. Dalam teori *Balance of Threat*, dijelaskan bahwa aliansi merupakan sebuah respon atas sebuah ancaman. Negara yang lebih lemah kekuatannya maka akan membangun aliansi dengan negara yang lebih kuat untuk merespon ancaman yang menargetkan negaranya. Dalam konflik Suriah, dominasi Rusia dalam aliansi Suriah, Iran, dan Lebanon-Hezbollah dengan mudah tercapai. Selain disebabkan oleh kekuatan negara Rusia yang lebih dibandingkan ketiga negara lain namun pemerintah Suriah sendiri meminta sebuah perlindungan terhadap negara lainnya terutama Rusia untuk merespon ancaman dalam konflik tersebut. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman baik desakan maupun serangan-serangan yang ditujukan kepada pemerintah Suriah oleh pihak oposisi, kelompok teroris, dan aliansi negara-negara Barat.

## Simpulan

Rusia memilih untuk membangun aliansi dengan Suriah dalam memperluas lingkaran pengaruh di kawasan Timur Tengah dikarenakan paritas kekuatan dan ketidakpuasan terhadap dominasi pengaruh Amerika Serikat sehingga menerapkan strategi *balancing* melalui keterlibatannya secara militer pada konflik Suriah tahun 2015. Hal tersebut diperkuat dengan data-data yang mendukung asumsi bahwa: 1) terhadap paritas kekuatan antara Rusia dengan Amerika Serikat; 2) ketidakpuasan Rusia terhadap dominasi *status quo* Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah; 3) dengan adanya dua kondisi terserbut kemudian mendorong Rusia untuk menjadi kekuatan besar di kawasan Timur Tengah dan dunia dengan menerapkan strategi *balancing* terhadap Amerika Serikat dan oleh karenanya mendorong Rusia untuk mendukung rezim Bashar al-Assad dalam konflik Suriah.

Dalam kasus ini, Rusia menerapkan strategi *balancing* dengan membangun aliansi dengan Suriah yang mana secara kekuatan terbilang lebih lemah dibandingkan dengan Rusia. Tujuan Rusia dalam penerapan strategi *balancing* terlihat untuk mengembangkan pengaruhnya dengan menjadi negara dominan dalam aliansi yang berisikan negara-negara yang lebih lemah. Hal tersebut disebabkan bantuan yang dibutuhkan oleh negara lemah kepada negara yang lebih kuat. Rusia sendiri telah mengembangkan kekuatan internal negaranya khususnya dalam aspek militer. Rusia telah terbukti mengembangkan persenjataannya dan memodernisasi sistem militernya. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatannya dalam beberapa konflik seperti aneksasi Crimea, destabilisasi Ukraina, dan secara aktif terlibat dalam konflik Suriah untuk membantu pemerintah Suriah. Dengan kekuatan militer yang berkembang secara signifikan menjadikan Rusia menjadi negara *challenger* bagi negara dominan Amerika Serikat. Telah terjadi paritas kekuatan diantara Rusia dengan Amerika Serikat sehingga dalam konflik Suriah keduanya saling memberikan pengaruh dalam upaya meresolusi konflik dengan cara masing-masing.

Upaya Rusia dalam mengembangkan pertumbuhan internal negaranya hingga mencapai paritas kekuatan didorong oleh ketidakpuasan terhadap tatanan internasional yang diciptakan negara dominan, Amerika Serikat. Ketidakpuasan Rusia kepada Amerika Serikat dalam konflik Suriah terlihat dengan cara Rusia memveto beberapa rancangan resolusi DK PBB. Rusia secara implisit menyatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk mereformasi pemerintahan Suriah menjadi lebih demokratis hanya dapat meningkatkan kemiskinan, kekerasan, dan jumlah kelompok ekstrimis seperti yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rusia membangun aliansi dengan pemerintah Suriah untuk memperluas pengaruh di kawasan Timur Tengah melalui penerapan strategi *balancing*. Dengan kekuatan pemerintah Suriah yang tergolong lemah maka pemerintah Suriah memanfaatkan aliansinya dengan Rusia untuk membantu dalam penyelesaian konflik di Suriah. Pertumbuhan internal Rusia yang cukup signifikan dalam aspek militer menjadikan Rusia mencapai paritas kekuatan dengan Amerika Serikat dan kemudian menunjukkan ketidakpuasannya terhadap dominasi Amerika Serikat dengan mencoba untuk memberikan pengaruhnya dalam konflik Suriah terutama terlibat secara militer maupun politik. Hal tersebut terbukti dimana tidak ada resolusi konflik Suriah tanpa adanya persetujuan dari Rusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Carr, E.H. "The Twenty Years' Crisis: An Introduction to the Study of International Relations" Papermac. London, England. 1995.
- Kugler, Jacek, Organski, A.F.K. "The Power Transition: a Retrospective and Prospective Evaluation". Handbook of War Studies. Boston: Unwin Hyman. 1989: 172-175.
- Mankoff, Jeffrey. "Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics". Rowman & Littlefield, 2009: 5
- Sakwa, Richard. "Russian Politics and Society". London: Routledge,. Fourth edition. 2008: 299.
- Zvyagelskaya, Irina. "Russia, the New Protagonist in the Middle East" dalam "Putin's Russia: Really Back?". Ledizioni Ledi Publishing. Milan, 2016: 85.

### JURNAL

- Arab Center for Research and Policy Studies, "Geneva Conference II: Challenges Faced in Syria and the Region". Doha, Qatar. 2014: 1.
- Blanchard, Christopher M dan Jeremy M. Sharp. "Possible U.S. Intervention in Syria: Issues for Congress". Congressional Research Service. 2013.
- El-May, Mahmoud. "The Jasmine Revolution". Turkish Policy Quarterly. Volume 9 Number 4. 2010: 58. (Online) Tersedia dalam : <http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/the-jasmine-revolution-winter-2010-en.pdf> [Diakses pada 24 Maret 2017]
- Humud, Carla E et al. "Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response" Congressional Research Service. 2017.
- Institute for the Study of War Research Team. "Russian Airstrikes in Syria (September 30, 2015 – September 19, 2016)" Institute for the Study of War. 2016. (Online) Tersedia dalam : <http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Russian%20Airstrikes%20Maps%20SEPT%202015-SEPT%202016.pdf> [Diakses pada 22 Oktober 2017]
- Shoham, Dr. Dany. "The Syrian Sarin Attacks of August 2013 and April 2017". The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. No. 452. 2017: 2.
- Walt, Stephen M. "Alliance Formation and the Balance of World Power" International Security , Vol. 9, No. 4. The MIT Press. (Spring, 1985): 4-9.



## LAMAN INTERNET

- Anonim. 2014a.** “What is the Geneva II conference on Syria?” dalam **BBC NEWS**, 22 Januari. (Online) Tersedia dalam: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24628442> [Diakses pada 18 Oktober 2017]
- Anonim. 2014b.** “Bashar Assad wins Syria presidential election with 88.7% of vote” dalam **RT**, 4 Juni. (Online) Tersedia dalam: <https://www.rt.com/news/163696-assad-win-president-syria/> [Diakses pada 18 Oktober 2017]
- Anonim. 2016.** “Syrian Army Controls 93% of Aleppo - Russian MoD” dalam **Sputnik International**, 12 Desember. (Online) Tersedia dalam: <https://sputniknews.com/middleeast/201612091048367280-syrian-army-aleppo/> [Diakses pada 30 Oktober 2017]
- Anonim. 2017.** “Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps” dalam **BBC NEWS**, 3 November. (Online) Tersedia dalam: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034> [Diakses pada 18 September 2017]
- Charbonneau, Louis. 2011.** “Russian U.N. envoy says not time for Syria sanctions” dalam **Reuters**, 24 Agustus. (Online) Tersedia dalam: <https://www.reuters.com/article/us-syria-un-russia/russian-u-n-envoy-says-not-time-for-syria-sanctions-idUSTRE77M7PR20110823> [Diakses pada 17 Oktober 2017]
- Gladstone, Rick dan Mohammad Ghannam. 2015.** “Syria Deaths Hit New High in 2014, Observer Group Says” dalam **The New York Times**, 1 Januari. (Online) Tersedia dalam: <https://www.nytimes.com/2015/01/02/world/middleeast/syrian-civil-war-2014-deadliest-so-far.html> [Diakses pada 17 Oktober 2017]
- Graham-Harrison, Emma. 2016.** “Aleppo airstrikes restart as Russia announces major Syria offensive” dalam **The Guardian**, 15 November. (Online) Tersedia dalam: <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/15/aleppo-airstrikes-resume-as-russia-announces-major-syria-offensive> [Diakses pada 30 September 2017]
- McDonnell, Patrick J. et al. 2015.** “Russia launches airstrikes in Syria amid U.S. concern about targets” dalam **Los Angeles Times**, 30 September. (Online) Tersedia dalam: <http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-kremlin-oks-troops-20150930-story.html> [Diakses pada 20 September 2017]
- Parfitt, Tom dan Bel Trew. 2015.** “Russia builds new base for more jets in Syria” dalam **The United Kingdom Times**, 1 Desember. (Online) Tersedia dalam: <https://www.thetimes.co.uk/article/russia-builds-new-base-for-more-jets-in-syria-qwb3qtsrdqx> [Diakses pada 30 September 2017]
- Rahman-Jones, Imran. 2017.** “Why does Russia support Syria and President Assad?” dalam **BBC NEWSBEAT**, 11 April. (Online) Tersedia dalam:

<http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/39554171/why-does-russia-support-syria-and-president-assad> [Diakses pada 2 Desember 2017]

**Shapiro, Jacob L. 2016. “A Tale of Two Economies: Russia and the US” dalam Geopolitical Futures, 29 November.** (Online) Tersedia dalam: <https://geopoliticalfutures.com/a-tale-of-two-economies-russia-and-the-us/> [Diakses pada 21 November 2017]

**Spencer, Richard. 2014. “Assad allies hail his election 'victory’” dalam The Telegraph, 5 Juni.** (Online) Tersedia dalam: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10879450/Assad-allies-hail-his-election-victory.html> [Diakses pada 18 Oktober 2017]

**TASS: Russia News Agency. 2016. “General Staff: Syrian army takes control of 93% of Aleppo’s territory” (Online) Tersedia dalam: <http://tass.com/defense/918123> [Diakses pada 30 Oktober 2017]**

## LAMAN RESMI NEGARA

**Defense Intelligence Agency United States of America. 2016. “Russia Military Power: Building a Military to Support Great Power Aspirations” (Online) Tersedia dalam: <http://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/Russia%20Military%20Power%20Report%202017.pdf> [Diakses pada 23 Oktober 2017]**

**Ministry of Defence of the Russia Federation. 2015. “Chief of the Main Operational Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces told about the results of operation held by Russian Aerospace Forces in Syria” (Online) Tersedia dalam: [http://eng.mil.ru/en/news\\_page/country/more.htm?id=12072380@egNews](http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12072380@egNews) [Diakses pada 25 April 2016]**

**Ministry of Foreign Affairs of the Russia Federation. 2016. “Joint Statement of the United States and the Russian Federation, as Co-Chairs of the I SSG, on Cessation of Hostilities in Syria” (Online) Tersedia dalam: [http://www.mid.ru/en/foreign\\_policy/news/-/asset\\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2105704](http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2105704) [Diakses pada “20 Oktober 2017]**

**President of Russia. 2010. “Beginning of Meeting with President of Syria Bashar al-Assad” (Online) Tersedia dalam: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/7708> [Diakses pada 17 Oktober 2017]**

**President of Russia. 2015a. “70th session of the UN General Assembly: Vladimir Putin took part in the plenary meeting of the 70th session of the UN General Assembly in New York” (Online) Tersedia dalam: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385> [Diakses pada 19 Oktober 2017]**

- President of Russia. 2015b. “Russia Calling! Investment Forum: Vladimir Putin took part in the 7th Russia Calling! Investment Forum organised by VTB Capital”. (Online)** Tersedia dalam: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/50498> [Diakses pada 19 Oktober 2017]
- President of Russia. 2015c. “Meeting with President of Syria Bashar Assad: President of Syria Bashar Assad made a working visit to Moscow on October 20. Russian-Syrian talks in narrow and expanded format with top Russian officials took place at the Kremlin”. (Online)** Tersedia dalam: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/50533> [Diakses pada 22 Oktober 2017]
- President of Russia. 2016. “Meeting with Russian Armed Forces service personnel” (Online)** Tersedia dalam: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/51526> [Diakses pada 10 Oktober 2017]
- United Nations. 2011. “Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria’s Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China” (Online)** Tersedia dalam: <https://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm> [Diakses pada 20 September 2017]
- United Nations. 2012. “Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League’s Proposed Peace Plan” (Online)** Tersedia dalam: <https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm> [Diakses pada 30 September 2017]
- United Nations. 2012. “Action Group for Syria: Final Communiqué. 30.06.2012” (Online)** Tersedia dalam: <http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf> [Diakses pada 30 September 2017]
- United Nations. 2015. “14 November 2015, Statement of the International Syria Support Group Vienna” (Online)** Tersedia dalam: <http://www.un.org/undpa/en/Speeches-statements/14112015/syria> [Diakses pada 7 Oktober 2017]

#### LAPORAN TAHUNAN

- World Bank Group. “Gross Domestic Product 2016”. (Online)** Tersedia dalam: <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf> [Diakses pada 21 November 2017]
- World Bank Group. “Russia Economic Report. The Russian Economy Inches Forward: Will that Suffice to Turn the Tide?”. No. 36|November 2016. (Online)** Tersedia dalam: <http://pubdocs.worldbank.org/en/429441478647721427/Russia-RER-36-Eng.pdf> [Diakses pada 21 November 2017]

World Bank Group. "Armed Forces Personnel, total". (Online) Tersedia dalam: <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1> [Diakses pada 3 Desember 2017].

#### PAPER KONFERENSI

Hof, Frederic C. et al, "Sectarian Violence in Syria's Civil War: Causes, Consequences, and Recommendations for Mitigation". Paper commissioned by The Center for the Prevention of Genocide, United States Holocaust Memorial Museum. 2013: 1-18.